

Analisis Peran Dinas Koperasi Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Koperasi di Kota Denpasar

Agustina Erika^{1*}, Ni Putu Erviani Astari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Pariwisata Pendidikan dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura

ervianiastari@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dinas koperasi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan koperasi, dimana pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kesehatan finansial dan keberlangsungan operasional koperasi sebagai lembaga ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi dan analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinas koperasi berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan dimana dinas koperasi tidak hanya memastikan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: peran dinas koperasi, pengawasan, pengelolaan keuangan

1. Pendahuluan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Perkembangan koperasi pada tahun 1945, dengan pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa) pada tahun 1950 untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa.

Seiring dengan konsep otonomi daerah, peran Dinas Koperasi dan UMKM semakin diperkuat, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Era reformasi di akhir tahun 1990-an melihat peningkatan peran Dinas Koperasi dan UMKM, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dalam mendukung UMKM sebagai moto pertumbuhan ekonomi (Dewi Sinta, Fadilah Zulfa 2024).

Sejalan dengan lahirnya Pemerintah Kota Denpasar maka beberapa Instansi Vertikal seperti Kanwil Perindag, Kanwil Sosial, Kanwil Tenaga Kerja, Kanwil Penerangan dan Kanwil Dep. Koperasi UKM Prvinsi Bali juga merancang untuk membentuk kantor Departemen di Kota Denpasar. Khususnya Kanwil Dep. Koperasi UKM Provinsi Bali telah merintis pembentukan Kandep Koperasi UKM Kota Denpasar dengan sebutan" Koordinator Pembina Koperasi UKM di

Kota Denpasar” dengan salah satu pertimbangan saat itu dari Jumlah Koperasi yang ada di Bali (± 715) sebanyak 60% berada di wilayah Kota Denpasar.

Lebih lanjut melalui UU No. 22 Tahun 1999 dengan Otonomi penuh untuk Kota Denpasar, maka sejak tahun itu mulai diadakan pembahasan masalah kelembagaan Pemerintah Kota Denpasar dan diiringi dengan menginventaris terhadap Prasarana, Personil, Pembiayaan dan Dokumentasi yang diisilahkan dengan P3D Provinsi yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu Dinas Koperasi mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan koperasi yang merupakan aspek penting dalam menciptakan organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Pentingnya pengawasan terletak pada kemampuannya melindungi kepentingan para anggota koperasi dan menjaga integritas sistem keuangan organisasi. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, atau praktik korupsi.

Pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan usaha koperasi. Dengan sistem pengawasan yang komprehensif, manajemen dengan cepat mengidentifikasi potensi risiko keuangan, membuat proyeksi yang akurat, dan mengambil tindakan korektif secara tepat waktu. Hal ini memantu koperasi tetap stabil, adaptif dan mampu berkembang dalam lingkungan ekonomi yang dinamis dan kompetitif.

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kunci sukses pengembangan ekonomi daerah karena selain bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sekaligus mengarah kepada pemerataan pendapatan. Walikota Denpasar mencanangkan Program Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada budaya lokal akan senantiasa mendorong dan mengembangkan potensi perekonomian secara optimal dengan mempertimbangkan keunggulan di masing – masing sektor, seperti sektor pertanian dalam arti luas, industri dan perdagangan yang didukung oleh lembaga keuangan dan Koperasi yang ada di wilayah tersebut secara terpadu dan bersinergi, sehingga akan mampu menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi

Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMKM). Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, penulis akan menganalisis peran dinas koperasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan Koperasi di Kota Denpasar. Adapun judul penelitian ini ialah “Analisis Peran Dinas Koperasi Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Koperasi di Kota Denpasar”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang dimana data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut dipilih untuk menghasilkan gambaran mendalam dan komprehensif tentang peran Dinas Koperasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan koperasi di Kota Denpasar.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Koperasi di Denpasar dewasa ini maju cukup pesat. Sampai saat ini dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Gerakan Koperasi di Kota Denpasar mencapai 1,7 triliun. Hal ini dikatakan Plt. Kadis Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar Drs. Made Susanta, MAG. Ketika ditemui di Kantornya, Senin (11/1). Menurutnya Koperasi yang ada di Kota Denpasar sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Hampir semua kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi ditopang oleh Koperasi, kata Susanta. Saat ini di Kota Denpasar kata Susanta terdapat 789 Koperasi dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 2.700 orang. Jadi sumbangan gerakan koperasi dalam penyerapan lapangan kerja juga cukup tinggi. Ini tentu dapat mengurangi dampak pengangguran, katanya.

Ditambahkan bahwa usaha Koperasi cukup yang sudah ada sejak dulu sebelum jaman kemerdekaan merupakan soko guru perekonomian masyarakat. Sebagai instansi yang diberikan tanggung jawab untuk membina Koperasi, pihaknya mengaku akan terus mendorong dan meningkatkan peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Disamping membantu dibidang permodalan yang tidak kalah penting adalah pembinaan dibidang manajemen dan peningkatan SDM, sehingga mampu bersaing dengan lembaga perekonomian lainnya, pungkasnya.

Dinas Koperasi Kota Denpasar memiliki peran yang strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan koperasi untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berdaya saing. Kemudian Peran ini diwujudkan melalui pelatihan kepada pengurus koperasi, seperti pelatihan manajemen keuangan, sosialisasi regulasi perkoperasian, serta pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dinas koperasi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan koperasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini terbukti meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

Adanya upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi akan sangat membantu koperasi-koperasi untuk lebih meningkatkan kesehatan keuangan maupun manajemen koperasinya. Selain itu, Dinas Koperasi juga akan membimbing koperasi yang belum bisa menyusun laporan keuangan serta memberikan strategi terhadap koperasi yang masih belum bisa berkembang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Koperasi yaitu meningkatkan koperasi yang berkinerja baik.

Melalui program pembinaan tersebut diharapkan setiap koperasi dapat mengembangkan setiap sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendekatan yang sistematis tidak hanya meningkatkan kinerja individual Koperasi di Denpasar tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem koperasi yang sehat dan kompetitif. Dengan demikian, peran Dinas Koperasi menjadi sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian gerakan koperasi.

Lebih lanjut, Widiyanti dan Sunindhia (2008) menekankan bahwa keberhasilan koperasi sangat tergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Dinas Koperasi Kota Denpasar telah menunjukan kepemimpinan strategis dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada koperasi-koperasi di wilayahnya. Pendekatan proaktif tidak hanya membantu koperasi bertahan tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan model bisnis yang lebih modern.

Peran Dinas Koperasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan koperasi disusun sebagai alat untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai kondisi keuangan koperasi. Data ini memberikan gambaran yang akurat kepada anggota koperasi dan pihak terkait lainnya.

No	Kecamatan	Koperasi			Anggota			RAT	Karyawan			Manager		
		Jml	Aktif	Tidak Aktif	Jml	L	P		Jml	L	P	Jml	L	P
1	Denpasar Barat	280	104	176	31,300	17,453	13,847	64	605	605	351	40	31	9
2	Denpasar Selatan	343	143	200	40,241	25,005	15,236	93	948	948	529	71	57	14
3	Denpasar Timur	317	115	202	26,869	16,098	10,771	66	482	482	281	41	29	12
4	Denpasar Utara	217	107	110	30,457	17,242	13,215	62	529	529	340	31	23	8
Jumlah		1,157	469	688	128,867	75,798	53,069	285	2,564	1,063	1,501	183	140	43

Modal Sendiri (Rp)	Modal Luar (Rp)	Volume Usaha (Rp)	SHU (Rp)	Asset (Rp)
167,555,937,641	409,664,340,575	406,094,584,692	21,722,570,789	543,555,448,980
255,360,038,393	1,037,218,007,669	769,107,824,878	25,924,595,893	1,329,504,772,272
202,185,813,198	441,450,588,775	440,199,502,243	17,733,774,450	670,480,868,974
148,756,631,616	475,288,281,023	408,238,651,239	13,557,975,281	644,437,051,079
773,860,420,849	2,363,621,218,042	2,023,640,563,052	78,938,916,413	3,187,978,141,305

Laporan keuangan koperasi dalam tabel tersebut berkaitan dengan peran Dinas Koperasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan karena:

- Dinas Koperasi bertanggung jawab mengawasi kondisi keuangan koperasi di wilayah Denpasar, yang terlihat dari data 4 koperasi yang dilaporkan.
- Informasi seperti modal, pinjaman, volume usaha, SHU (Sisa Hasil Usaha), dan aset menggambarkan kinerja keuangan koperasi, yang penting bagi Dinas Koperasi dalam melakukan pengawasan.
- Dengan memantau indikator-indikator keuangan ini, Dinas Koperasi dapat mengevaluasi kepatuhan koperasi terhadap peraturan, menilai risiko, dan memberikan bimbingan untuk perbaikan pengelolaan keuangan jika diperlukan.
- Laporan ini memungkinkan Dinas Koperasi untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan kebutuhan dukungan yang diperlukan masing-masing koperasi agar dapat beroperasi dengan sehat secara finansial.

Jadi, tabel tersebut menyediakan data penting bagi Dinas Koperasi dalam menjalankan peran pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan

keuangan koperasi di wilayah Denpasar.

4. Simpulan

Dinas Koperasi memiliki Kota Denpasar memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan dan memperdayakan gerakan koperasi di wilayahnya. Dengan jumlah 789 koperasi yang mampu menghimpun dana masyarakat hingga 1,7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.700 orang, koperasi di Denpasar telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian daerah. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti pelatihan manajemen keuangan, sosialisasi regulasi, dan pendampingan teknis, telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kinerja koperasi.

Pendekatan sistematis Dinas Koperasi dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan koperasi telah menciptakan ekosistem koperasi yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Melalui serangkaian program yang komprehensif, Dinas Koperasi tidak hanya membantu koperasi dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mendorong pengembangan strategi bisnis yang inovatif dan adaptif. Hal ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan anggota, mendorong pertumbuhan individual koperasi, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat Denpasar.

5. Daftar Rujukan

- Arifin, S. (2015). Analisis Sistem Pengawasan Keuangan pada Koperasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-62
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi: Prinsip dan Strategi*. Penerbit Erlangga.
- Kartasapoetra, G. (2005). *Koperasi Indonesia: Berbagai Strategi Pengelolaan*. Rineka Cipta.
- Sugiartha, I. N. (2021). Pengelolaan Keuangan Koperasi di Kota Denpasar. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(4), 45-58.
- Sukadana, I. G. P. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Koperasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 14(3), 23-35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun (1992) tentang Perkoperasian.
- Widiyanti, N., & Sunindhia, Y.W. (2008). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

